

Di Muktamar Persis, Prabowo: Pak Jokowi Ilmunya di Atas Saya

BANDUNG (IM) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa Persatuan Islam (Persis) merupakan organisasi Islam yang penting dalam membela dan mempertahankan negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Muktamar ke-16 Persis, di Bandung, Sabtu (24/9). Khadirannya Prabowo diacara tersebut untuk mewakili Presiden Jokowi.

Mulanya, Prabowo merasa terkejut ketika Jokowi memerintahkannya ke Bandung untuk menghadiri muktamar tersebut.

"Saya juga kaget saya di jateng dapat perintah dari Istana siap langsung ke Bandung, tapi insting Pak Jokowi itu tajam, tajam sekali. Jadi kemungkinan beliau merasa mungkin Prabowo ada hubungan emosional ya ke Persis, apalagi di Jawa Barat lagi," kata Prabowo.

Prabowo pun menceritakan saat dirinya menjabat Danjen Kopassus, ia merupakan

Jenderal Baret Merah, yang mempunyai banyak strategi.

"Tapi harus saya akui, Pak Jokowi itu memang ilmunya di atas saya," ujarnya.

Dengan mendapat kesempatan untuk mewakili Jokowi menghadiri Muktamar Persis, Prabowo mengaku sebagai kehormatan yang besar bagi dirinya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat meninjau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Jadi saya simak tadi sambutan beliau dan Pak Kyai itu luar biasa, jadi grogi juga saya, jadi maaf-maaf wartawan, ini perintah Presiden," kata Prabowo. Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang mementingkan pertahanan meski Jokowi tidak berlatar belakang militer dan tidak pernah di bersekolah militer.

"Beliau bukan tentara, tidak pernah sesko, tidak pernah Lemhannas, tapi di bawah pemerintah beliau, beliau memberi anggaran pertahanan yang terbesar sepanjang republik ini," ujarnya. ● han

MA dan KY Diminta Segera Pecat Hakim Agung Sudrajad Dimiyati

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dugaan suap pengurusan perkara mengungkap celah dalam manajemen di Mahkamah Agung (MA).

"Pelajaran selanjutnya, bagaimana ini bisa terjadi, pasti ada yang tidak beres dengan manajemen kerja di MA, seperti yang pernah terjadi di manajemen kerja di MK saat Akl Mochtar kena OTT KPK," ujar Jimly, Sabtu (24/9).

Jimly juga menyarankan supaya MA dan Komisi Yudisial (KY) segera mengambil langkah memproses pemecatan Sudrajad, dan tidak perlu menunggu keputusan dalam perkara dugaan suap itu berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Jimly meminta MA segera mengevaluasi kerja internal terkait sistem yang dibangun dan manajemen kerja di dalamnya.

Kasus dugaan suap jual beli perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK hingga berujung penempatan hakim agung sebagai tersangka mencerminkan amburadulnya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Jimly menekankan perlu pembenahan secara sistemik dari tingkat MA

hingga pengadilan negeri dan bukan sebatas retorika, pidato, atau umbar amarah yang dilakukan pejabat terkait.

"Bagaimana konsep pemerintahannya? Konsep MA, Kementerian Hukum dan HAM membenahi ini? Ini kan ada di wewenang negara," ucapnya.

Jimly mendorong lembaga eksekutif mengambil langkah tegas dan tidak mendiamkan dugaan suap di lingkungan MA yang sudah beberapa kali terjadi dan terungkap. Di sisi lain, MA memberhentikan sementara Sudrajad Dimiyati dari posisi Hakim Agung Kamar Perdata selepas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Menurut Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain, mereka akan segera menerbitkan surat terkait pemberhentian sementara untuk Sudrajad supaya tersangka fokus menjalani proses hukum.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau atau jika aparaturnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparaturnya guna menghadapi pemeriksaan yang sebaik-baiknya," ujar Zahrul dalam jumpa pers bersama KPK dan KY di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9). ● han

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski Ketumnya "Wanita Emas" jadi Tersangka

JAKARTA (IM) - Pemilihan Umum (KPU) RI dipastikan terus melakukan verifikasi atas berkas pendaftaran Partai Republik Satu kendati ketua umum partai tersebut, Hasnaeni Moein alias "Wanita Emas" kini berstatus tersangka.

Sebagai informasi, Partai Republik Satu mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada 14 Agustus 2022 lalu. Belakangan, KPU RI mengumumkan bahwa Partai Republik Satu masuk dalam daftar 24 partai politik yang berkasnya dinyatakan lengkap dan berhak dilakukan verifikasi administrasi.

Kini, tahapan telah beralih dari verifikasi administrasi ke masa perbaikan administrasi.

"Sebagai salah satu dari 24 parpol pendaftar yang dokumennya telah diverifikasi administrasi di rentang tanggal 2 Agustus sampai 9 September 2022," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Minggu (25/9).

"Dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut, Partai Republik Satu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen pendaftarannya yang BMS (belum memenuhi syarat) dan mengganti dokumen pendaftarannya yang TMS (tidak memenuhi syarat)," lanjutnya.

Idham berujar, proses

verifikasi ini sudah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

"Tanggal 15-28 September 2022 masa perbaikan dokumen pendaftaran partai politik peserta pemilu," ujarnya.

Hasil verifikasi administrasi dan perbaikannya ini bakal diumumkan pada 14 Oktober 2022. Jika lolos, maka Partai Republik Satu, sesuai mekanisme, berhak mengikuti verifikasi faktual kepengurusan, alamat kantor, dan keanggotaan.

Tahapan verifikasi faktual ini berlangsung mulai 15 Oktober 2022 hingga 4 November 2022. Status Hasnaeni pun, dalam konteks verifikasi ini, masih dianggap sah sesuai struktur kepengurusan Partai Republik Satu yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, selama belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak politiknya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Hasnaeni Moein sebagai tersangka baru kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast (WBP) pada tahun 2016 sampai dengan 2020, Kamis (22/9).

Ita ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan eks Direktur Utama PT WBP Jarot Subana, eks General Manajer PT WBP Kristadi Juli Hardjanto. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari Satu

Jika dilakukan investigasi lebih mendalam atas mafia peradilan, kemungkinan bakal terungkap fakta yang lebih menakutkan dari OTT Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati.

TERI JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD ungkap, hakim agung yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK bisa jadi lebih dari satu orang.

"Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut, dan hukumnya harus berat juga," ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, saat diwawacara salah satu wartawan TV swasta, Sabtu (24/9).

Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9) malam dan berhasil menjerang 10 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lima di antaranya adalah pegawai Mahkamah Agung (MA, 4 orang) dan seorang hakim agung, Sudrajad Dimiyati.

Sudrajad kini ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Tak hanya ditahan KPK, Sudrajad Dimiyati diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Pernyataan Mahfud sena-

da dengan penilaian Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fery Amsari, yang mengungkap fenomena mafia peradilan ini "sudah menjadi rahasia umum".

"Jika mau diselami lebih dalam, kita akan melihat jumlah kasus yang lebih besar," kata Fery, Jumat (23/9).

"Menurut saya, apa yang terjadi dengan kasus penangkapan OTT hakim dan pegawai Mahkamah Agung beserta para lawyer (yang memberi suap) ini sebenarnya adalah fenomena gunung es," katanya.

Bahkan menurut Fery, jika investigasi atas mafia peradilan ini dilakukan lebih jauh, tak tertutup kemungkinan bakal terdapat "fakta-fakta yang lebih menakutkan" ketimbang yang terjadi dalam OTT KPK Rabu malam.

Fakta-fakta yang lebih menakutkan itu, menurut dia, adalah permainan perkara di peradilan.

"Coba saja dibuka pengadilan publik perkaranya di pengadilan. Berapa banyak yang diminta suap," kata Fery.

Mahfud menambahkan bahwa hakim agung terjerang OTT KPK harus dihukum berat karena mereka seyogianya menjadi "benteng keadilan". Oleh karena itu, ia mewanti-wanti jangan sampai ada yang menutupi kasus ini.

"Jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital," kata Mahfud.

"Anda melindungi, (maka) Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Gitu saja," katanya menambahkan.

JALAN SEHAT DEMOKRAT UNTUK RAKYAT

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya (ketiga kiri) didampingi Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra (kedua kiri), Anggota DPR RI Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin (kedua kanan) Anggota DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy (ketiga kanan), dan anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto (tengah) menghadiri acara jalan sehat Demokrat untuk rakyat di Alun-alun Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (25/9). Jalan sehat yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat dalam rangkaian hari jadi Demokrat itu diikuti ribuan warga dan simpatisan.

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin, berharap dirinya bisa menjadi Wakil Presiden (Wapres) suatu saat nanti.

Doa itu Cak Imin lontarkan usai mendapat kejutan ulang tahun dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"Moga-moga doanya terakbul dan minimal saya jadi Wapres hahaha," ujar Cak Imin saat ditemui di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan,

Minggu (25/9). Berdasarkan hasil Muktamar PKB, Cak Imin akan diusung oleh para kadernya sebagai calon presiden (capres). Namun, Cak Imin menyadari perolehan suara PKB kalah besar dibandingkan dengan PDI-P. Sehingga dia pun menurunkan targetnya dari Presiden menjadi Wapres.

"Hahaha enggak, enggak. Partainya kalah gede hahaha," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid

mengatakan, partainya tetap mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hal itu dia tegaskan, meski rekan koalisinya Partai Gerindra juga memiliki calon yang diusung jadi capres yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya kalau di PKB sampai hari ini mandatnya sebagai capres, kalau Pak Prabowo kan masih mengumumkan," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/8). ● mei



JALAN SEHAT RESTORASI PARTAI NASDEM DI MAKASSAR
Sejumlah warga mengikuti jalan sehat di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/9). Jalan sehat yang dilaksanakan Partai Nasdem dengan tema restorasi tersebut diikuti ribuan warga dan simpatisan Partai Nasdem.

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN SAHAM PT BIP SENTOSA

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT BIP Sentosa ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, mengumumkan hasil pengambilalihan bahwa PT Magna Investama Mandiri Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah melakukan pengambilalihan 42.199 (empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham yang mewakili 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dalam, dari pemegang saham Perseroan yaitu PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk sebesar 59,24% (lima puluh sembilan koma dua empat persen) dan PT Tri Daya Investindo sebesar 40,758% (empat puluh koma tujuh lima delapan persen), sehingga total saham dalam Perseroan yang telah diambilalih adalah sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang semula dimiliki oleh (i) PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk dan (ii) PT Tri Daya Investindo berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT BIP Sentosa No. 19 dan No. 20 keduanya dibuat pada tanggal 31 Agustus 2022 di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 September 2022.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Jakarta, 26 September 2022
Direksi PT BIP Sentosa

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN SAHAM PT GRHA SWAHITA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Grha Swahita ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Badung, mengumumkan hasil pengambilalihan 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham yang mewakili 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang semula dimiliki oleh PT Tri Daya Investindo telah dialihkan kepada PT Magna Investama Mandiri Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Jual Beli saham PT Grha Swahita No. 21 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Perubahan pemegang saham Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 September 2022.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Jakarta, 26 September 2022
Direksi PT Grha Swahita

Tokoh Agama di Papua Minta Lukas Enembe Taat Hukum

JAKARTA (IM) - Tokoh agama Papua, Ismail Asso, mengajak masyarakat mendukung penegakan yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe jika ia meminta seluruh pihak untuk mendukung proses penegakan hukum," kata Ismail Asso kepada wartawan dikutip, Minggu (25/9).

Dukungan yang sama, kata Ismail, juga harus diberikan ketika KPK melakukan penegakan hukum terhadap bupati dan pejabat lainnya yang diduga terlibat korupsi.

Sementara kepada Lukas Enembe, ia berharap agar Lukas bersikap kooperatif dengan pihak aparat penegak hukum dan segera menyerahkan diri, apalagi jika merasa tidak bersalah.

"Jika beliau memang tidak korupsi, beliau dengan secara baik sudah selayaknya menyerahkan diri, bekerja sama dengan aparat penegak hukum," ujar pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Asso itu.

Sebelumnya Aloysius Renwarin selaku pengacara Lukas Enembe membenarkan kliennya telah menerima surat panggilan kedua dari KPK.

"Sudah, panggilannya diterima tanggal 26 (September)," kata Renwarin dalam keterangannya pada Rabu (21/9).

Meski demikian, Renwarin belum bisa memastikan lebih lanjut apakah kliennya akan menghadiri panggilan tersebut atau tidak karena Lukas Enembe masih sakit.

"Iya, nanti akan dilihat apakah klien kami bisa datang, beliau masih dalam keadaan sakit, kemungkinan tidak akan hadir, yang jelas beliau masih sakit," kata Renwarin.

KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilaksanakan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka. ● han